



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013



JAKARTA,

FEBRUARI 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang-berhasilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2013.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Ditjen Perhubungan Udara mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien yang didukung oleh SDM yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis

b. Sasaran

Dalam Perubahan Rencana Strategik Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2010 – 2014 mempunyai 12 (dua belas) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatkan **Keselamatan** jasa transportasi udara;
2. Meningkatkan **Keamanan** jasa transportasi udara;
3. Meningkatkan **Pelayanan** jasa transportasi udara;
4. Meningkatkan **Aksesibilitas** pelayanan jasa transportasi udara dan konektivitas antar wilayah;
5. Meningkatkan **Kapasitas** sarana dan prasarana transportasi udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (*sustainable growth*);
6. Meningkatkan pemenuhan **Standar Teknis** dan **Standar Operasional** sarana dan prasarana transportasi udara;
7. Peningkatan **Kualitas SDM**;
8. Melanjutkan **Restrukturisasi Kelembagaan**;
9. Melanjutkan reformasi **Regulasi**;
10. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan **Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN** Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;



11. Meningkatkan pengembangan **Teknologi** transportasi udara yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim;
12. Menurunnya dampak transportasi udara terhadap **Lingkungan** melalui pengurangan konsumsi energi tak terbarukan dan emisi gas buang.

Dari 12 (dua belas) sasaran yang ditargetkan dalam alur akuntabilitas Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2013, ada 7 (tujuh) sasaran yang rata - rata nilai capaiannya diatas 100% dan 5 (lima) sasaran sasaran memiliki rata-rata nilai capaian sasaran dibawah 100% yakni :

1. **Sasaran III** : Meningkatnya **Pelayanan** Jasa Transportasi Udara dengan presentase rata - rata capaian sebesar **98.86%**. Hal ini disebabkan karena Indikator Persentase pencapaian On Time Performance (OTP) capaiannya dibawah 100%. Hal ini disebabkan adanya faktor penyebab keterlambatan masih terjadi yakni yang tertinggi penyebabnya adalah faktor Teknik Operasional sebesar 44.48%
2. **Sasaran IV** : Meningkatnya **Aksesibilitas** Pelayanan jasa transportasi udara dan konektivitas antar wilayah dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar **87,46 %**. Hal ini disebabkan karena indikator jumlah penumpang perintis yang diangkut sasaran yang nilai capaiannya dibawah 100% yaitu hanya sebesar **53.14 %**. rendahnya capaian tersebut antara lain disebabkan karena terlambatnya pencairan anggaran akibat blokir anggaran; kurangnya informasi terkait jadwal penerbangan perintis, pembatalan penerbangan yang disebabkan pesawat mengalami kerusakan dan karena tidak adanya pesawat cadangan. Disarankan agar menyusun kebijakan pelaksanaan angkutan udara perintis secara Multiyears; melakukan pergantian penerbangan sesuai dengan ketentuan berlaku dan mengatur jadwal penerbangan kembali.
3. **Sasaran V** : Meningkatnya Kapasitas **Sarana** dan **Prasarana** Transportasi Udara sesuai ketentuan sehingga dapat memberikan dukungan bagi perekonomian nasional yang berkelanjutan (sustainable growth) dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar **83,95 %**. Capaian tersebut diperoleh karena terdapat indikator jumlah kargo yang diangkut capaiannya dibawah 100% yaitu mencapai **50,63 %**. Hal tersebut disebabkan dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang kargo/ barang yang diangkut oleh pesawat udara.
4. **Sasaran VI** : Meningkatnya pemenuhan **Standar Teknis** dan **Standar Operasional** sarana dan prasarana transportasi udara dengan persentase rata-



indikator jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan yang nilai capaiannya dibawah 100% yaitu mencapai **66 %**. Hal ini disebabkan dengan pertumbuhan jumlah armada pesawat udara di Indonesia lebih memperhatikan pengawasan keselamatan dalam hal pesawat yang beroperasi harus memenuhi kelaikudaraan.

5. **Sasaran VII : Peningkatan Kualitas SDM** dengan persentase rata-rata capaiannya sebesar **97.32 %** dikarenakan indikator sasarannya yaitu Jumlah personil penerbangan yang memiliki lisensi yang nilai capaian sebesar **87.67%**, hal ini disebabkan penurunan jumlah personil penerbangan yang memiliki lisensi. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan jumlah personil penerbangan tersebut adalah karena kurangnya diklat kompetensi terkait/ terbatasnya kuota peserta diklat; mutasi personil teknisi penerbangan sebagai pejabat struktural serta sedang dibebaskan tugas dalam jabatan teknisi penerbangan.

Sampai dengan akhir Desember 2013 **permasalahan** yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Ditemukan kegiatan - kegiatan lebih bersifat new insiatif yang diperlukan dalam Rencana Kerja namun belum tercantum dalam dokumen rencana strategis.
- b. Terlambatnya proses persetujuan pencairan tanda bintang pada kegiatan tertentu terutama kegiatan Angkutan Udara Perintis.
- c. Ketidakpastian terhadap penghematan/pemotongan anggaran serta penambahan anggaran dengan indikator pada umumnya DIPA APBN-P terbit di akhir tahun anggaran
- d. Kendala cuaca ekstrim dalam penyelesaian kegiatan.
- e. Hambatan keamanan di dalam penyelesaian kegiatan pada UPT/Satker tertentu.
- f. Masalah pembebasan lahan oleh Pemda mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi bandar udara.
- g. Terbatasnya fasilitas sarana penunjang pelaporan pelaksanaan kegiatan DIPA 2013 sehubungan dengan sistem e-monitoring berbasis internet.

Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh antara lain :

- a. Agar kegiatan-kegiatan lebih bersifat new insiatif yang diperlukan dalam Rencana Kerja perlu penyesuaian dalam rencana strategis sebagai bahan rencana Pembangunan berikutnya.



- b. Menyusun kebijakan pelaksanaan angkutan udara perintis secara Multiyears
- c. Perlunya perencanaan yang lebih matang dalam menyusun rencana anggaran, untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi.
- d. Perlunya koordinasi dengan auditor (BPKP, Itjen dll) agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang peraturan pengadaan barang dan jasa.
- e. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
- f. Perlu antisipasi terhadap hambatan yang biasa ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan baik faktor alam atau curah hujan atau bandara yang belum siap dioperasikan untuk angkutan udara perintis.

